



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BERDASAR LOGIC MODEL**



TAHUN 2018-2023

SESUAI DENGAN

PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, yang merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sejak Kepala Daerah Terpilih dilantik pada bulan September 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023.

Akhirnya saya sampaikan semoga paparan yang tertulis rencana strategi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, 02 September 2019

Camat Cibeunying Kidul,



Drs.H.ARIS RUSDIANTO,M.Si
NIP 19690410 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma dari *stering* kepada *empowerment* seperti kondisi dewasa ini, telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima. Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lebih dari itu, dipacu pula oleh tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan tersedianya aparat pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai representasi pembuat buah karyanya.

Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar masing-masing Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam konteks kompetisi itulah

kemampuan kompetitif pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang profesional dan berkualitas.

Untuk itu Kecamatan Cibeunying Kidul harus memiliki Visi dan Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Pemerintah kota Bandung adalah :

***“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman,
Sejahtera dan Agamis”***

Penyampaian Renstra ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSKLUSIF		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL	10
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul	10
	2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul	11
	2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul	15
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kidul	19
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
	2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja	21
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul	23
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul	36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL	40

	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bandung	48
	3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Barat	52
	3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri	52
	3.3.2. Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	53
	3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
	3.4.1. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031	60
	3.4.2. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)	65
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	79
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	81
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibeunying Kidul	81
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	87
	5.1 Strategi Kecamatan Cibeunying Kidul	87
	5.2 Analisis Logic Model	88
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	91
	6.1 Program dan Kegiatan Renstra 2013-2018	91
	6.2 Rencana Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023	101
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	114

BAB VIII	PENUTUP	117
-----------------	----------------	-----



RENSTRA 2018-2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun **Rencana Strategis** (RENSTRA) Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja .

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibunong Kidul Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra, dengan kegiatan-kegiatan Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD, Orientasi mengenai Renstra PD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD dan penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kepada Sistem Informasi Pembangunan Daerah,
- b. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal
- c. Tahapan Penyusunan Rancangan
- d. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan
- f. Penetapan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Cibeunying Kidul selaku kepala Perangkat Daerah , serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

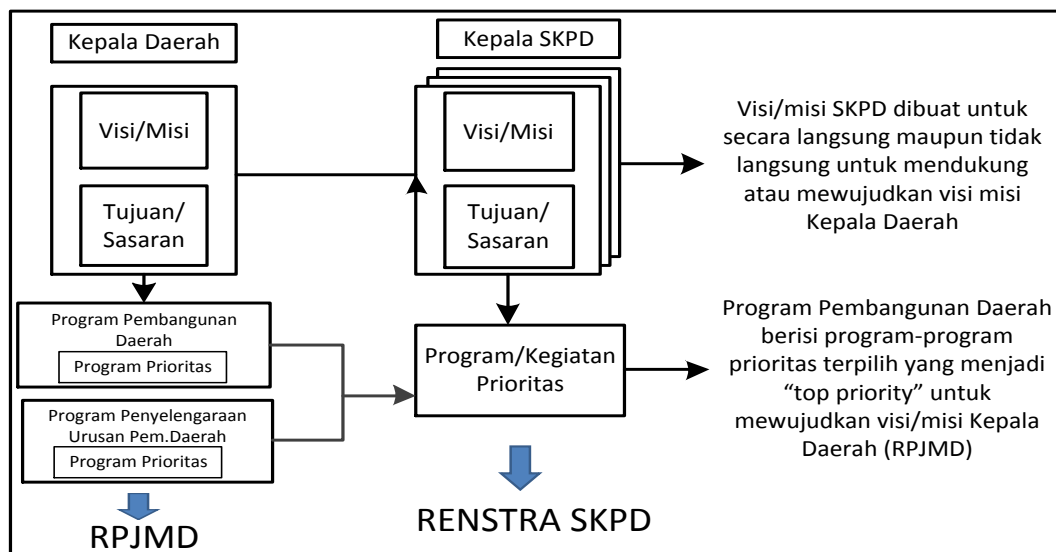
Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam

RPJMD. Visi Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD.

Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Bandung yaitu Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025, yang dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :

Gambar 1-1

Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
32. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 050/SE.034-Bapp tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tahun 2018–2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023 yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Rentsra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah, Peraturan perundang undangan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan. Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan (1) Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, (2) Telaah Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (3) Telaah Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul dan Renstra Provinsi (4) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan (5) Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat mengenai tujuan dan sasaran jangka

menengah dari Kecamatan Cibeunying Kidul.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung.

BAB VIII PENUTUP



RENSTRA 2018-2023

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan ujung tombak keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kecamatan juga berperan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Sebagai upaya untuk memperkuat Pemerintahan Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota dan untuk Kota Bandung telah dikeluarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan 124 (seratus dua puluh empat) rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Cibeunying Kidul berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi sebagai dasar dalam menyusun berbagai kebijakan Kota Bandung yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Gambaran umum Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan deskripsi dari kondisi mengenai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- (i) tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul;
- (ii) sumber daya Kecamatan Cibeunying Kidul;
- (iii) kinerja pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
- (iv) tantangan dan peluang pengembangan .

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul

Camat Cibeunying Kidul mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul. Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying

Kidul tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016.

Adapun rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;

13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

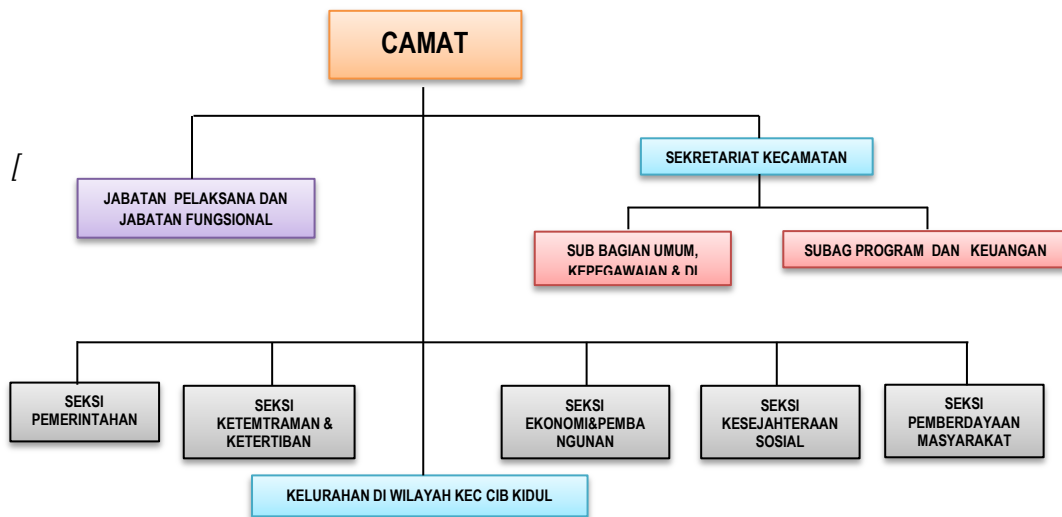
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cibeunying Kidul

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung maka Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari:
 - b.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b.2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

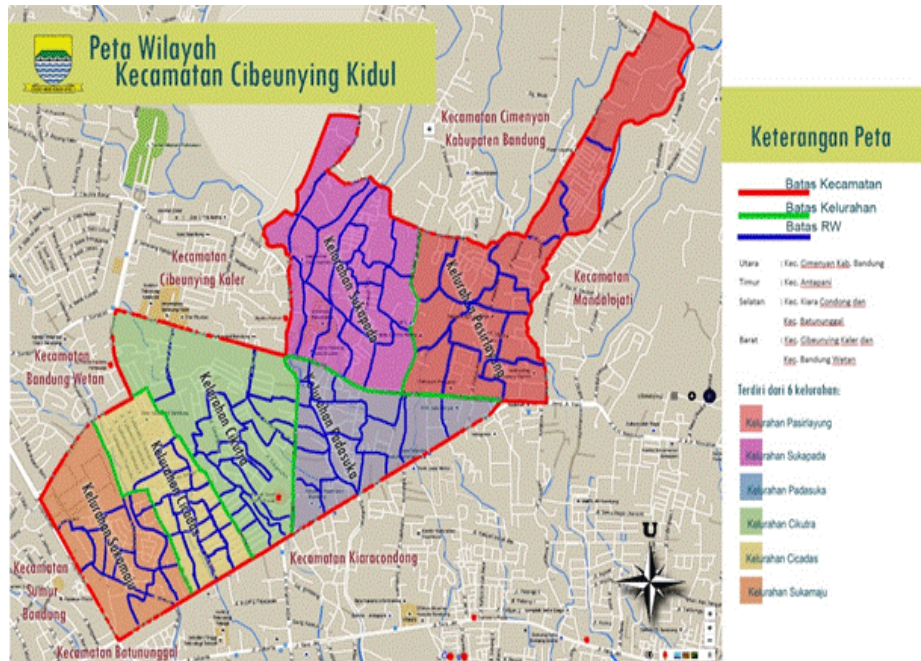


Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dilihat dari perspektif geografis merupakan bagian dari pusat perkotaan sebelah timur Kota Bandung yang memiliki luas wilayah ± 512,34 Ha., dengan batasan wilayah meliputi:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Cibeunying Kaler - Kecamatan Cimencyan Kab. Bandung
Sebelah Timur	:	Kecamatan Mandalajati
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Kiaracondong - Kecamatan Batununggal
Sebelah Barat	:	Kecamatan Cibeunying Kaler - Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

Gambar 2.2
PETA WILAYAH KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL



Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Cibeunying Kidul dibagi dalam 6 Kelurahan, 87 RW dan 562 RT dengan rincian per kelurahan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Padasuka	103	16
2	Pasirlayung	87	13
3	Cikutra	107	15
4	Sukapada	98	16
5	Sukamaju	81	12
6	Cicadas	86	15
JUMLAH		562	87

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018

Adapun Jumlah Penduduk Kecamatan Cibeunying Kidul per bulan November 2018, tercatat sebanyak 104.089 jiwa, yang terdiri dari

52.615 jiwa laki-laki dan 51.474 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cibeunying Kidul saat ini sebanyak 68.277 KK terdiri dari 33.522 Pemilik KK Laki-laki dan 34.725 Pemilik KK Perempuan.

Bila dilihat dari segi kepadatan penduduk, dapat dihitung bahwa kepadatan di Kecamatan Cibeunying Kidul mencapai nilai 202 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu, untuk posisi akhir November 2018 jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Umur	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	0 – 5 tahun	4477	4289	8766
2	6 – 9 tahun	4119	4254	8373
3	10 – 15 tahun	4804	4658	9462
4	16 – 19 tahun	5126	4489	9615
5	20 – 24 tahun	4766	4582	9348
6	25 – 29 tahun	4567	4435	9002
7	30 – 34 tahun	3931	4286	8217
8	35 – 39 tahun	3934	3796	7730
9	40 – 44 tahun	4017	3935	7952
10	45 – 49 tahun	3733	3687	7420
11	50 – 54 tahun	3074	3041	6115
12	55 – 59 tahun	2614	2567	5181
13	60 – 64 tahun	1912	1948	3860
14	65 – keatas	1395	1650	3045
	Jumlah	52.615	51.474	104.089

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Bulan Oktober 2018

Sedangkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, sebaran pendidikan penduduk di Kecamatan Cibeunying Kidul dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	5031	4831	9862
2	Tidak Tamat SD	2659	2996	5655
3	Belum Tamat SD	7684	6918	14602
4	Tamat SD	9750	8744	18494
5	SLTP	8047	9202	17249
6	SLTA	10280	9670	19950
7	Akademi/Sarjana Muda	5225	4972	10197
8	Sarjana/Pascasarjana/1 ain2	3993	4084	8077
JUMLAH		52.669	51.417	104.086

Sumber :Kasie Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Bulan Oktober 2018

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Tenaga Kerja
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Pekerjaan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1	Pegawai Negeri	3088	2320	5408
2	TNI	1089	335	1424
3	Pegawai swasta	8485	6829	15314
4	Petani	35	33	68
5	Pedagang	4412	4542	8954
6	Pelajar	16909	14020	30929
7	Mahasiswa	5821	6226	12047
8.	Pensiunan	2125	2124	4249
9	Lain-lain	10505	15188	25693
JUMLAH		52.469	51.617	104.086

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeunying Kidul

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, Camat Cibeunying Kidul

dibantu oleh 49 pegawai yang tersebar di Kecamatan dan 6 Kelurahan di Wilayah Cibeunying Kidul. Pada bulan 30 November 2018, terdapat kekosongan 3 Pejabat Struktural Eselon IVa, dikarenakan pensiun selama periode tahun 2018 yaitu untuk jabatan Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul, Lurah Sukapada dan Lurah Sukamaju. Adapun komposisi pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul dapat terlihat dalam tabel komposisi pegawai berdasarkan eselon berikut ini :

Tabel 2.5
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Uraian	Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IVa	Eselon IVb	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Cibeunying Kidul	1	1	4	2	8	16
2	Kelurahan Cicadas	-		1	4	1	6
3	Kelurahan Cikutra	-		1	4	1	6
4	Kelurahan Padasuka	-		1	4	0	5
5	Kelurahan Sukapada	-		0	4	2	6
6	Kelurahan Pasirayung	-		1	4	1	6
7	Kelurahan Sukamaju	-		0	4	1	5
	JUMLAH	1	1	8	26	14	50

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebanyak 6 orang (12,00%) memiliki pendidikan S2, sebanyak 31 orang (62,00%) yang memiliki pendidikan S1, sebanyak 2 orang (4,00%) yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 15 orang (28,30%) yang memiliki pendidikan SLTA, sebanyak 2 orang (3,77%) yang memiliki pendidikan SLTP. Uraian diatas dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jml
1	Kecamatan Cibeunying Kidul	-	3	10	0	3	16
2	Kelurahan Cicadas	-	2	3	-	1	6
3	Kelurahan Cikutra	-	-	5	-	1	6
4	Kelurahan Padasuka	-	-	4	-	1	5
5	Kelurahan Sukapada	-	1	2	1	2	6
6	Kelurahan Pasirlayung	-	-	4	1	1	6
7	Kelurahan Sukamaju	-	-	3	-	2	5
	JUMLAH	-	6	31	2	11	50

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018

Dilihat dari komposisi jumlah pegawai di Kecamatan Cibeunying Kidul, terdapat kekurangan untuk komposisi staf, seperti yang tergambar di Kelurahan Padasuka sehingga mengakibatkan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus dipegang oleh Kasie Ekbang dan LH Kelurahan Padasuka, sehingga ini menyalahi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.2 Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Secara umum sarana dan prasarana terbagi dalam berbagai bidang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Bidang Kesehatan pada Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Prasarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Rumah Bersalin/BKIA	-
3	Dokter Umum	41
4	Dokter anak	-
5	Dokter kandungan	10
6	Dokter Gigi	22
7	Dokter spesialis lainnya	10
8	Dokter Hewan	-
9	Puskesmas	2
10	Klinik/Balai Pengobatan	11
11	Apotik	31
12	Toko Obat	-
13	Posyandu	90

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018

Tabel 2.8
Bidang Olah Raga Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Lapangan	Jumlah
1	Sepak Bola	2
2	Bulutangkis	12
3	Tenis Meja	62
4	Voli	16
5	Basket	5
6	Tenis lapangan	3
7	Futsal	5

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018

Tabel 2.9
Bidang Ekonomi Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Uraian	Jumlah
1	Koperasi	60
2	UKM	195
3	Pasar Selapan/Umum	1
4	Usaha Perdagangan	286
5	Toko/Swalayan	30
6	Warung Makan	214
7	Restaurant	4
8	Kios/Warung Kelontong	585
9	Pedagang kaki Lima	914
10	Bank	13
11	Industri Makanan	117
12	Industri Kerajinan	122
13	Industri Pakaian	286
14	Perusahaan Angkutan	3
15	Percetakan/Sablon	122
16	Bengkel Motor/Sepeda	21
17	Bengkel Mobil	5

Sumber: Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Dengan begitu Kecamatan Cibeunying Kidul dapat melaksanakan pelayanan secara

maksimal kepada Masyarakat. Adapun gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cibeunying Kidul dalam renstra tahun 2013-2018 berdasarkan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dapat disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pecapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat				74	80	82,00	n/a	n/a	74,93	74,57	84,32	n/a	n/a	101,25 %	95,71%	102,83%	n/a	n/a
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100,00%	100,00%	100,00%	n/a	n/a
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI				825	900	910	n/a	n/a	895	950	950	n/a	n/a	108,48%	105,56%	104,40%	n/a	n/a
4	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				100	100	100	n/a	n/a	99,50	100	n/a	n/a	n/a	99,50%	100%	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100,00%	100,00%	n/a	n/a
6	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik				66,6 6	100	100	n/a	n/a	83,33	100	100	n/a	n/a	125%	100,00%	100%	n/a	n/a
7	Prosentase RW Juara				42,1 4	51,72	61,30	n/a	n/a	42,91	51,72	63,22	n/a	n/a	101,83%	100,00%	103,13%	n/a	n/a
8	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				70	75	80	n/a	n/a	71,43	76,19	90,48	n/a	n/a	102,04%	101,59%	113,10%	n/a	n/a
9	Rasio Anggota Linmas				084: 1	1:085	1:0.86	n/a	n/a	0,842: 1	1:1,00	1:1.01	n/a	n/a	100,24%	117,65%	117,14%	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)														
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				n/a	n/a	n/a	83	83	n/a	n/a	n/a	86,34	84,33	n/a	n/a	n/a	104,02%	101,60%
11	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				n/a	n/a	n/a	75	75	n/a	n/a	n/a	90,04	82,76	n/a	n/a	n/a	120,05%	110,35%
12	Nilai Evaluasi AKIP				50,01	65,10	68,50	n/a	n/a	50,08	60,77	68,79	n/a	n/a	100,14%	93,35%	100,42%	n/a	n/a
13	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100%	100,00%	100%	n/a	n/a

Sumber Data : LAKIP Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2014 s.d Tahun 2018

Interpretasi dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah sebagai berikut indikator kinerja pelayanan di Kecamatan Cibeunying Kidul selama Renstra 2013-2018 mengalami perubahan, dimana selama tahun 2014 s.d 2016 jumlah indikator kinerja yang diukur berjumlah 10 indikator sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 hanya sebanyak 2 indikator kinerja, dikarenakan adanya revisi Renstra Kota Bandung sesuai dengan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung.

Indikator Kinerja Kecamatan di akhir Renstra 2013-2018 menjadi 2 indikator yaitu :

1. Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Kecamatan Cibeunying Kidul dalam dua tahun terakhir ini mampu mencapai kinerja melebihi dari 100% ini dapat terlihat dari pencapaian indikator pertama yaitu rata-rata IKM sebesar 104,20% di tahun 2017 dan 101,60 pada tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat pemberdayaan sebesar 120,08% di tahun 2017 dan 110,55%.

Untuk pencapaian realisasi anggaran selama periode Renstra 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
 Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
BELANJA	12.733.268 .150	24.820.223 .274	28.778.148 .004	34.631.553 .261	41.161.224. 644,85	12.045.833 .098,00	23.643.589 .765	27.911.063 .602,00	34.108.406 .019	38.298.361 .681	94,60 %	95,26 %	96,99 %	98,49 %	93,05 %	28.424.883.466,6	849.712.592,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.528.239. 200	6.268.327. 645	7.334.317. 375	10.580.342 .865	13.081.405. 548,73	4.987.173. 767	6.024.596. 200	7.009.681. 323	10.496.922 .368	12.269.203 .300	90,21 %	96,11 %	95,57 %	99,21 %	93,79 %	8.558.526.526,60	8.157.515.391,60
BELANJA LANGSUNG	7.205.028. 950	18.511.895 .629	21.443.830 .629	24.051.210 .396	28.079.819. 096,12	7.058.659. 331	17.618.993 .565	20.901.382 .279	23.611.483 .651	26.029.158 .381	97,97 %	95,16	97,47 %	98,17 %	92,70 %	19.856.356.940	19.043.935.441,4

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2014-2018

Tabel 2.12
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
 Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	88.907.000	93.070.000	108.848.000	129,273,200	82.093.200	84.232.000	86.964.500	99.485.000	124,653,450	43.447.450	94,73	96,42	91,39	96,43	52,92	100.438.300	97.756.480
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	1.053.850.000	643.092.000	899.205.000	1,233,998,143		1.045.526.800	623.318,750	876.459.450	1,200,749,820		99,21	96,92	97,47	97,31	96,67	957.536.285,75	936.513.705
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.271.862.550	1,797,952,220	3.025,850,129	4,451,164,258	3.700.945.622	1.259.853.530	1.797.952.220	3.004.909.110	4,431,405,012	3,609,671,875	99,06	97,54	99,31	99,56	97,53	2.849.554.955,80	2.820.758.349,40

Tabel 2.12
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
 Tahun 2013-2018**

Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	411.000.000	389.564.000	392,845,000	971,256,000	1.483.007.880	391.218.100	384.247,500	389.975.000	971,223,000	1.415.639.960	95.18	98.63	99.04	99,99	95,46	729.534.576	710.460.712
Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	1.865.660.000	43.875.000	2.975.208.000	3,139,143,800	3.158.357.300	1.861.337.950	40.670.000	2.937,380.500	3,133,793,850	3.056.858.900	99.77	95.56	98,83	99,83	96,79	2.236.244.100	2.206.008.240
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	88.215.000	205.239.250	193.213.000	34,600,100	8.623.000	86.615.500	196.137.500	187.078.350	34,211,220	7.255.650	98.87	92.69	96,82	98,88	84,14	106.178.470	102.659.644
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	0	0	0	0	427.092.932	0	0	0	0	364,242,318	N/A	N/A	N/A	N/A	85,28		
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	391.471.668	0	0	0	0	336.050.450	N/A	N/A	N/A	N/A	89,39		

Sumber Data : Simda Keuangan Tahun 2014-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya rasio penyerapan dana baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung hampir mendekati angka 100%. Penyerapan anggaran di akhir tahun pelaksanaan Renstra mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 93,05% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 93,79% dan Belanja Langsung sebesar 92,70 %.

Penurunan penyerapan anggaran di akhir tahun renstra diakibatkan karena tidak disetujuinya Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diakibatkan karena keterlambatan pencapaian RAPBD Perubahan Kota Bandung ke Provinsi, sebagai akibatnya kegiatan yang sudah direncanakan di dalam anggaran perubahan tidak terealisasi.

Capaian program dan kegiatan di Kecamatan Cibeunying Kidul selama Renstra Tahun 2013-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”.

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun , sebesar **Rp. 100.438.300,00.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat melalui : Pendataan dan pembinaan Koperasi, peningkatan pemahaman dan promosi usaha melalui pembinaan UKM.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan selama lima tahun rata-rata sebesar **Rp. 97.756.480,00.**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
 - a) Terlaksananya Pembinaan UKM, Koperasi masing-masing sebanyak 4 kali kegiatan berupa Sosialisasi Peningkatan Peran UKM dan Kegiatan Cullinary

Night sebagai sarana promosi UKM di Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul

b) Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Koperasi, masing-masing sebanyak 5 kali kegiatan.

2. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”.

Kegiatan ini direncanakan selama 4 tahun sedangkan di tahun ke 5 kegiatan ini dipecah menjadi 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan, rata-rata selama 4 tahun sebesar **Rp. 957.536.285,75.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui : pendataan penyandang cacat, serta pembinaan RBM dan Posyandu.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata sebesar **Rp. 936.513.705,00.**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
 - a) Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, sebanyak 4 kali kegiatan.
 - b) Terlaksananya pembinaan RBM, sebanyak 4 kali pembinaan.
 - c) Terlaksananya pembinaan Posyandu, setiap tahun pembinaan per kelurahan.

3. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan selama lima tahun rata-rata sebesar **Rp. 2.849.554.955,80.**

- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan Infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat, melalui musrenbang kecamatan dan musrenbang kelurahan, Pemeliharaan fasilitas umum dan sosial lingkungan RW di kelurahan seperti pemeliharaan kerb jalan, kegiatan pembersihan sungai, serta pengadaan alat biofori, tempat sampah dan Sumur Resapan.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan selama lima tahun rata-rata sebesar **Rp. 2.820.758.349,40**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu
 - a) Terlaksananya Musrenbang, sebanyak 5 tahun pelaksanaan baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan .
 - b) Terlaksananya Penyusunan data pembangunan kecamatan, setiap tahun .
 - c) Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kelurahan, setiap tahun.
 - d) Terlaksananya penyuluhan lingkungan yang bersih dan sehat sebanyak 4 kali pelaksanaan.
 - e) Pemeliharaan Kirmir dan Kerb di jalan Lingkungan
 - f) Pembuatan sumur resapan
 - g) Pengadaan alat biofori

4. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp. 729.534.576,00.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban, berupa : pembinaan Linmas,

Satwankar serta Ormas dan Penataan PKL di Zone Merah (Kelurahan Cicadas).

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp 710.460.712,00**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
 - a) Terlaksananya Pembinaan Ormas dan OKP setiap tahun yang diadakan di kelurahan dan kecamatan.
 - b) Terlaksananya Pembinaan Linmas, setiap tahun di tingkat Kecamatan.
 - c) Terlaksananya Pembinaan Satwankar setiap tahun di tingkat Kecamatan
 - d) Pendataan PKL dan Pembinaan PKL

5. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp. 2.236.244.100,00.**
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan Pemerintahan umum berupa : Pembuatan profil Monografi dan data Monografi, pembinaan RT/RW, pembinaan kelurahan siaga serta pemberian honorarium RT dan RW sesuai kebijakan Walikota terpilih.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp 2.206.008.240,00**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
 - a) Tersedianya data monografi Kecamatan dan Kelurahan
 - b) Terlaksananya pembinaan RT dan RW, setiap tahun di setian kelurahan dan kecamatan

c) Terlaksananya Pemilihan kelurahan terbaik, selama lima tahun.

6. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat”

➤ **Rencana :**

- 1) Input dana yang direncanakan rata-rata selama lima tahun sebesar **Rp. 106.178.470,00**.
- 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berupa : sosialisasi Perda Kependudukan, pendataan penduduk musiman, pemutakhiran data penduduk serta pendampingan operasi Yustisi Kependudukan.

➤ **Realisasi.**

- 1) Input dana yang direalisasikan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar **Rp 102.659.644,00**
- 2) Output yang direalisasikan, yaitu :
 - a) Terlaksananya sosialisasi perda kependudukan, setiap tahun.
 - b) Terlaksananya pendataan penduduk musiman, setiap tahun.
 - c) Terlaksananya pemutakhiran data penduduk, setiap tahun.
 - d) Penyisiran warga yang belum melaksanakan perekaman e-ktp setiap tahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul

Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Cibeunying Kidul

mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja;
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
- 6) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- 7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Cibeunying Kidul harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- 8) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- 9) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- 10) Pemberdayaan masyarakat menjadi salahsatu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-

2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Cibeunying Kidul berada dalam Kawasan Perumahan dan Perdagangan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan

1. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Cibeunying Kidul;
2. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
5. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Masih tingginya angka pengangguran;
7. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Cibeunying Kidul belum tertata dengan baik.
8. Terdapatnya zona merah PKL di Jalan Cicadas yang memerlukan penanganan yang cukup serius yang berakibat pada tingkat kemacetan yang cukup tinggi.
9. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul masih perlu ditingkatkan lagi;
10. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Cibeunying Kidul memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan;
2. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul diprioritaskan pada pendirian flat seperti yang sudah dilaksanakan di Jalan Achmad Yani Bandung;
3. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini.

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibeunying Kidul pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2017, dari target sebesar 83,00 terealisasi sebesar 86,50, dimana semua unit kerja mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian standar pelayanan publik di Kecamatan Cibeunying Kidul perlu dilakukan reviu dalam rangka

perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi tangible. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.

2. Permasalahan penanganan banjir, genangan di Kecamatan Cibeunying Kidul sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Cibeunying Kidul saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan terutama di Kelurahan Sukapada, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cicadas dimana terjadi pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan salah satu SKPD di dalamnya.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a) Ruang pelayanan yang belum memadai terutama di Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul dimana gedung kantor dapat dianggap tidak layak karena telah banyak kerusakan
- b) Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 80%;
- c) Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;

- d) Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
- e) Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
- f) Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
- g) Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
- h) Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola).
- i) Masih rendahnya tingkat partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan kewilayahan.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul, sebagai berikut

- a) Sumber Daya Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan masih mengandalkan Non ASN;
- b) Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
- d) Kurangnya partisipasi ASN dalam membuat rencana strategis Kecamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Cibeunying Kidul, **masalah internal** yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung antara lain :

- a) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja, ditandai dengan adanya kekosongan pejabat structural baik di kecamatan maupun kelurahan serta adanya kelurahan yang tidak mempunyai staf pelaksana;

- b) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
- c) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
- d) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah:

- a) Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
- b) outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
- c) Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
- d) Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- e) Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle);
- f) Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan., terutama di daerah Kelurahan Cikutra dan Kelurahan Cicadas.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. **Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good

governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaiki kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Kuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- c. Pengamanan barang daerah;
- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan

ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani**

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. **Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. **Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. **Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
- d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
- e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Cibeunying Kidultidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Cibeunying Kidul adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Cibeunying Kidul.

3.3.2 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan

5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan **beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023**, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategik dan untuk itu perlu

dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:

- a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
- a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Sub pusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

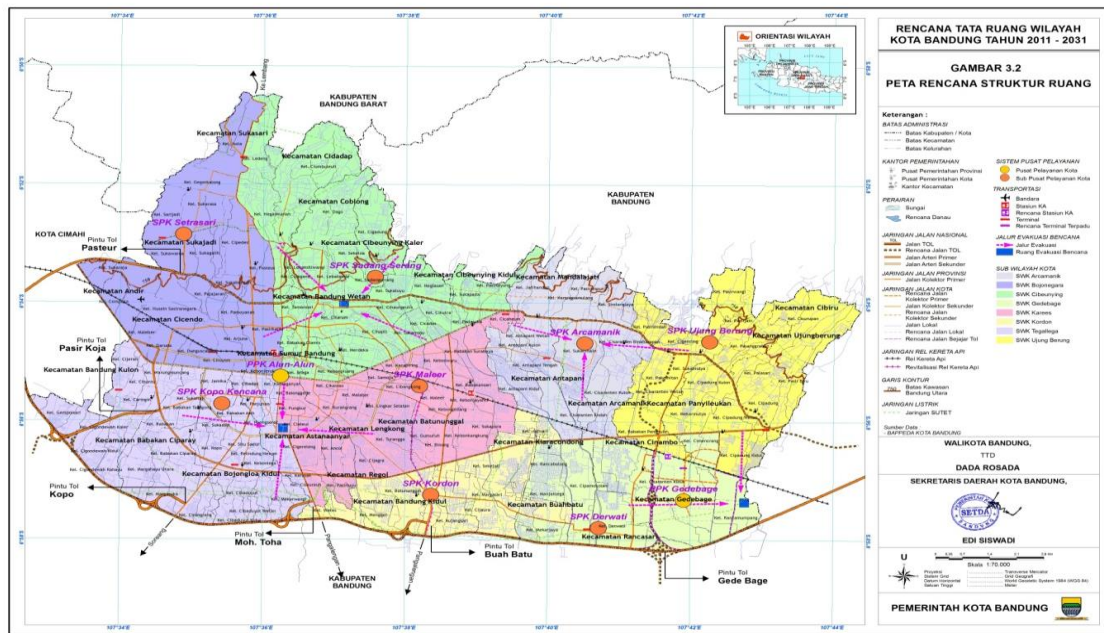
Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;

- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;

- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

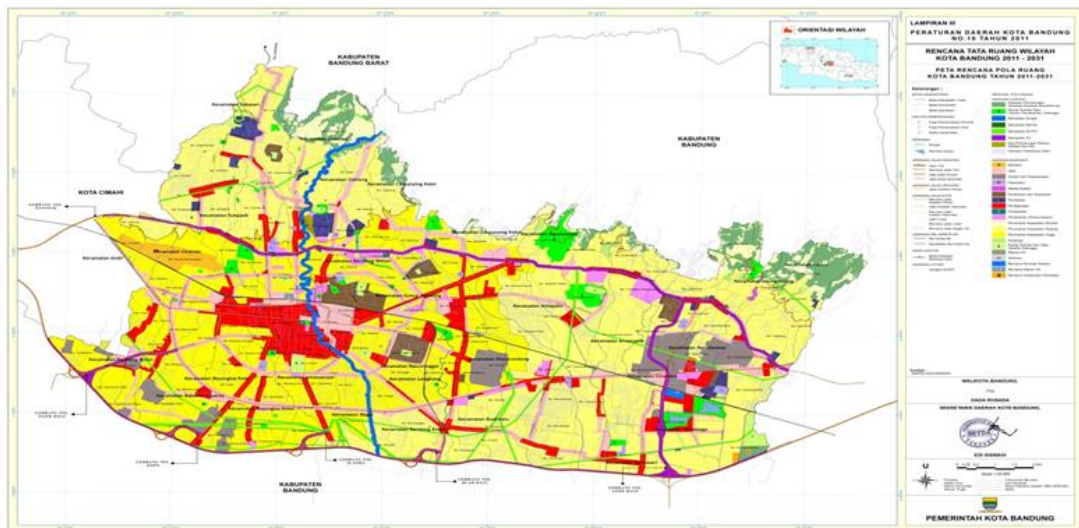
- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK

Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;

- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023.

Tabel 3.1
Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025
Periode Perencanaan Tahun 2013-2018

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
1	Terwujudnya Sumber daya manusia yang handal dan religius	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IPM	82,02	80,31	Realisasi IPM termasuk tinggi, namun fertilitas masih tinggi.
			Jumlah penduduk (maksimal)	2.835.223 Jiwa	2.499.809	
			Angka fertilitas	1,85	1,96	
		Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Indeks pendidikan	93,53	Realisasi penerapan SPM melampaui target, namun rata-rata lama sekolah masih rendah.	
			Rata-rata lama sekolah	12,17 Tahun		10,59
			Sertifikasi guru	75%		
			Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM	75%		100%
		Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Angka melek huruf	99,73 %	98,26%	
			Indeks kesehatan	81,87	Semua fasilitas kesehatan telah memenuhi SPM, namun tingkat kematian bayi/ibu masih tinggi.	
			Angka harapan hidup	74,45		73,86
			Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM	90%		100
			Angka kematian bayi	29/1000		66
			Jumlah kematian ibu melahirkan	11 orang/tahun		16
		Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung	Kurang dari 12 %	Tidak ada kasus		

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan	
		Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	N/A	Data realisasi tidak tersedia.	
			Tingkat Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah	Terwujudnya Sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama			
		Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	IPG pada tahun 2017 mencapai 95,52.		
			Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak			
2	Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi	10,33%	N/A	Kondisi perekonomian cukup bagus namun tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.	
			Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	minimal 16% (kategori sedang)			
			PDRB riil/kapita	minimal Rp 20 juta per tahun	N/A		
			Indeks daya beli	70,66			
			Tingkat inflasi umum	satu digit			3,46
			Tingkat pengangguran	maksimal 12%			8,44

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
			terbuka			
			Kesempatan kerja	minimal 92%		
			Nilai investasi berskala nasional	meningkat 40%		
		Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	35%		Data realisasi tidak tersedia.
		Terwujudnya kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya	Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah	Tumbuhnya kegiatan ekonomi antar daerah		
3	Terwujudnya kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani.	Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung	Akses informasi tentang pembangunan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tahapan proses pembangunan		Data realisasi tidak tersedia.
			Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Meningkatnya Rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik		
		Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Pengembangan pusat – pusat kebudayaan	Terwadahnya heterogenitas budaya dalam lingkungan Budaya Sunda		Data realisasi tidak tersedia.
			Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Optimalnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian budaya		

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
4	Terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara	50% lokasi/sample telah memenuhi BM	100 % lokasi/sampel telah memenuhi Baku Mutu	Kualitas udara dan air cukup baik.
		Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD	17 % sungai dan anak sungai	0 % sungai dan anak sungai Kota Bandung yang parameter COD dan BOD nya memenuhi baku mutu air kelas II pada PP No. 82 Tahun 2001	Namun baku mutu air sungai dan anak sungai buruk, dan realisasi RTH belum tercapai.
			Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku	sebesar ± 5.750 liter/detik	N/A	
			Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)	23%	Indikator persentase RTH dalam kondisi baik di Kota Bandung dari target tahun 2017 sebesar 45,50% dan realisasi capaian kinerja 44,32%	
		Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat	90% sampah dapat dikelola (30 % reuse, reduce dan recycle, 60% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35 % , dan landfill 25 %).	Pada tahun 2017, 97,47 % sampah dapat ditangani (17,8 % reuse, reduce dan recycle, 1,4 % dimanfaatkan menjadi sumber energi dan 78,27 % ke pemrosesan akhir secara landfill)	Realisasi pengelolaan sampah cukup baik, namun besarnya persentase pemrosesan landfill perlu dikaji ulang.
Tersedianya	Terbentuk struktur	Minimum	Keterbangun	Realisasi		

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
		Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	ruang kota	60% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif	an PPK Gedebage mencapai 51,68 % (Pengukuran tingkat keterbangunan infrastruktur PPK Gedebage dilakukan melalui 280 LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013 - 2018 pendekatan 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan dan perizinan (diberikan bobot 75%), pengadaan lahan (diberikan bobot 50%), proses konstruksi (diberikan bobot 75%) dan lahan yang sudah terbangun	keterbangunan dan pelayanan perizinan sesuai peraturan belum memenuhi target.

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
			Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	(diberikan bobot 100%). Pencapaian target mencapai 85 % (dihitung dengan pengukuran berdasarkan 3 (tiga) aspek, antara lain: perencanaan, berupa ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang (RTRW, RDTR, dan Peraturan Wali Kota) sebesar 40%, pemanfaatan ruang (implementasi dokumen perencanaan antara lain perizinan, pertanahan, dan lain sebagainya) sebesar 30%, serta aspek pengawasan	

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
					dan pengendalian tata ruang, persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan sebesar 15%.)	
		Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	Luas jalan min 4 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik	persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik dengan target 100,00% realisasinya sebesar 100,00% atau terealisasi sebesar 100% melalui peningkatan jalan sepanjang 52.463,85 m, rehabilitasi jalan	Sistem transportasi belum memenuhi target yang ditentukan terutama aspek penyebab kemacetan.

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
					sepanjang 25.045,97 m, dan pemeliharaan jalan seluas 301.839,59 m ² .	
			Indeks aksesibilitas	Indeks aksesibilitas minimum 7 km/km ² area	7,74 dari target revisi RPJMD sebesar 7,47	
			Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota	50% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota	Target sebesar 25:75 dengan realisasi sebesar 19,5 : 80,5 capaiannya masih di bawah target	
			Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek)	Teratasinya Aspek-aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 Aspek*		
		Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan	Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24	85% penduduk dilayani Air bersih dengan standar 120 liter/orang	N/A	Sarana dan prasana (infrastruktur) belum optimal melayani kebutuhan

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
		minimal	jam	/hari dengan pengaliran kontinu 24 jam		masyarakat.
			Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sudah berfungsi 100%.	Kota Bandung sampai saat ini belum memiliki TPA Sampah secara mandiri dan masih dibuang ke TPAS Sarimukti	
			Penataan sistem drainase Kota yang tertata	Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu; integrasi per wilayah pelayanan drainase kota; 75% sistem drainase kota terpadu	N/A	
			Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu	75% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah	Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem offsite dan onsite dari target 72	

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
			dengan IPAL	yang terpadu dengan IPAL	% realisasi sebesar 79,09 %	
		Terwujudnya mitigasi Bencana yang handal	Peningkatan pengelolaan bencana	Meningkatnya penanganan bencana		Data realisasi tidak tersedia.
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan	Terwujudnya peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base	Tingkat kualitas aparatur perencanaan dan pengelola data	Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan data.		Data realisasi tidak tersedia.
		Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Tingkat kualitas produk hukum yang produktif dan implementatif	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat dalam penerapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat		Data realisasi tidak tersedia.

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
				serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
6	Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu	Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal	Peningkatan Pendapatan Daerah	Rata-rata peningkatan Pendapatan 17%	Rata-rata peningkatan pendapatan daerah 16,5%.	Rata-rata peningkatan pendapatan cukup baik, namun pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional / kreatif belum optimal. Peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan kota belum dibangun dengan baik.
			Sinergitas APBN, APBD Propinsi & APBD Kota	APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi sepenuhnya	N/A	
			Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional mulai signifikan	Belum terdapat obligasi daerah & road fund	
		Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota	Pengembangan sistem insentif terhadap swasta	Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi sektor swasta	Belum terumuskan	
Pengembangan sistem pembiayaan dengan kemitraan	Berfungsinya perusahaan patungan untuk beberapa		Belum terbentuk			

No.	Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Tahap III (2013-2018)	Realisasi Kinerja s.d. Periode (2013-2018)	Hasil Telaahan
			pemerintah dan swasta	layanan jasa umum & barang publik		
			Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	Berfungsinya instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	Belum terbangun instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	
			Penyediaan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik	Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi masyarakat dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan, barang & jasa publik tersedia	Belum terdapat insentif	

Sumber: RKPD Kota Bandung Tahun 2005-20025, LKPJ AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, terutama yang berkaitan dengan fungsi pelayanan . Pada Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk dijadikan dasar isu strategis. Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kecamatan Cibeunying Kidul yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung pada tahun 2019 antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang harus disertai dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen bersama.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif agar tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan SDM aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan TUPOKSI dapat berdaya guna, berhasil guna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



**RENSTRA
2018-2023**

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

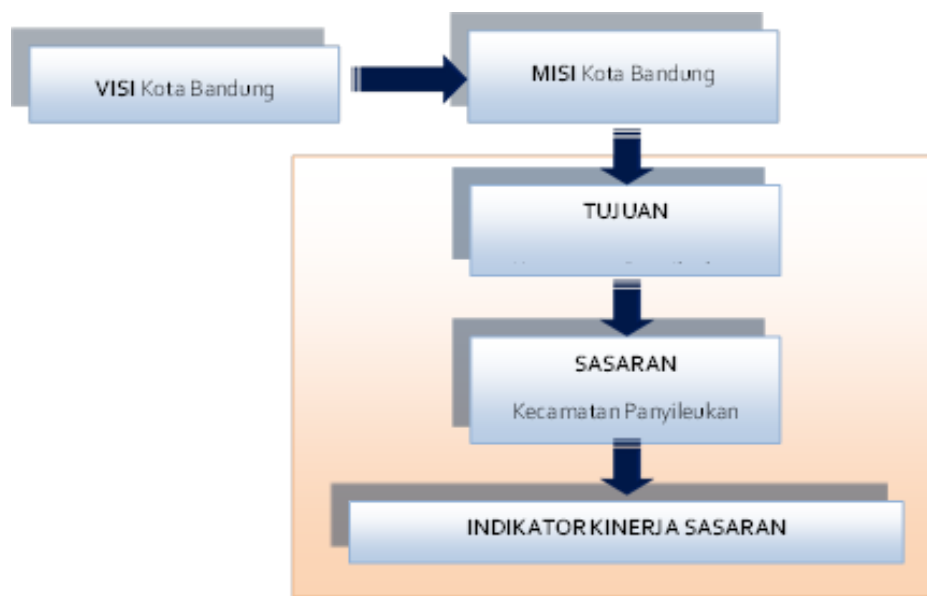
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibeunying Kidul

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Cibeunying Kidul menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kidul.

Keselarsan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.1
Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan
Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul:



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cibeunying Kidul

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Nulai	70,00	84,34	84,35	84,36	84,37	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul	1	Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	Nilai	70,00	84,34	84,35	84,36	84,37
			2	Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	Persentase Kelurahan Unggul	%	6,67%	33,33%	50,00%	66,67%	66,67%
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	15,71	16,71	17,71	18,71	19,71	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	15,71	16,71	17,71	18,71	19,71

Formulasi Pengukuran untuk masing-masing indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul, diperoleh dari Rata-rata IKM Kecamatan Cibeunying Kidul dan 6 Kelurahan se-Kecamatan Cibeunying Kidul dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Rata – Rata IKM dari Kec dan 6 Kel Se Kec Cib Kidul}}{7} \times 100\%$$

2. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu diperoleh dengan perhitungan/ formulasi :

$$\frac{\text{Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan BPK dan Inspektorat}} \times 100\%$$

3. Persentase Kelurahan Unggul diperoleh dengan perhitungan/ formulasi :

$$\frac{\text{Target Kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan Unggul}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$$

4. Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dengan perhitungan/ formulasi :

$$\frac{\% RW Unggul + \%PKK Unggul + \% Karang Taruna Unggul + \%LPM Unggul}{4} \times 100$$

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan. Kecamatan Cibeunying Kidul dengan aparat yang profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel.

Tujuan pertama berkaitan dengan Membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) dengan sasaran pertama yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai A pada tahun 2018 sesuai dengan realisasi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul 2018-2023.

Tujuan kedua yaitu Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2018 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018, Dan menjadi sasaran strategis pada Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul 2018-2023.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung 2018-2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.



RENSTRA 2018-2023

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Kecamatan Cibeunying Kidul

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model. Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan

tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

5.2. Analisis Logic Model

Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan **logic model** yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, outcomes dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, pendekatan *logic model* dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada kementerian/lembaga. *logic model* adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan output dan outcome yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan *logic model*, keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/relevan. Berikut ini adalah

logic model yang disusun untuk menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Cibeunying Kidul dengan RPJMD.

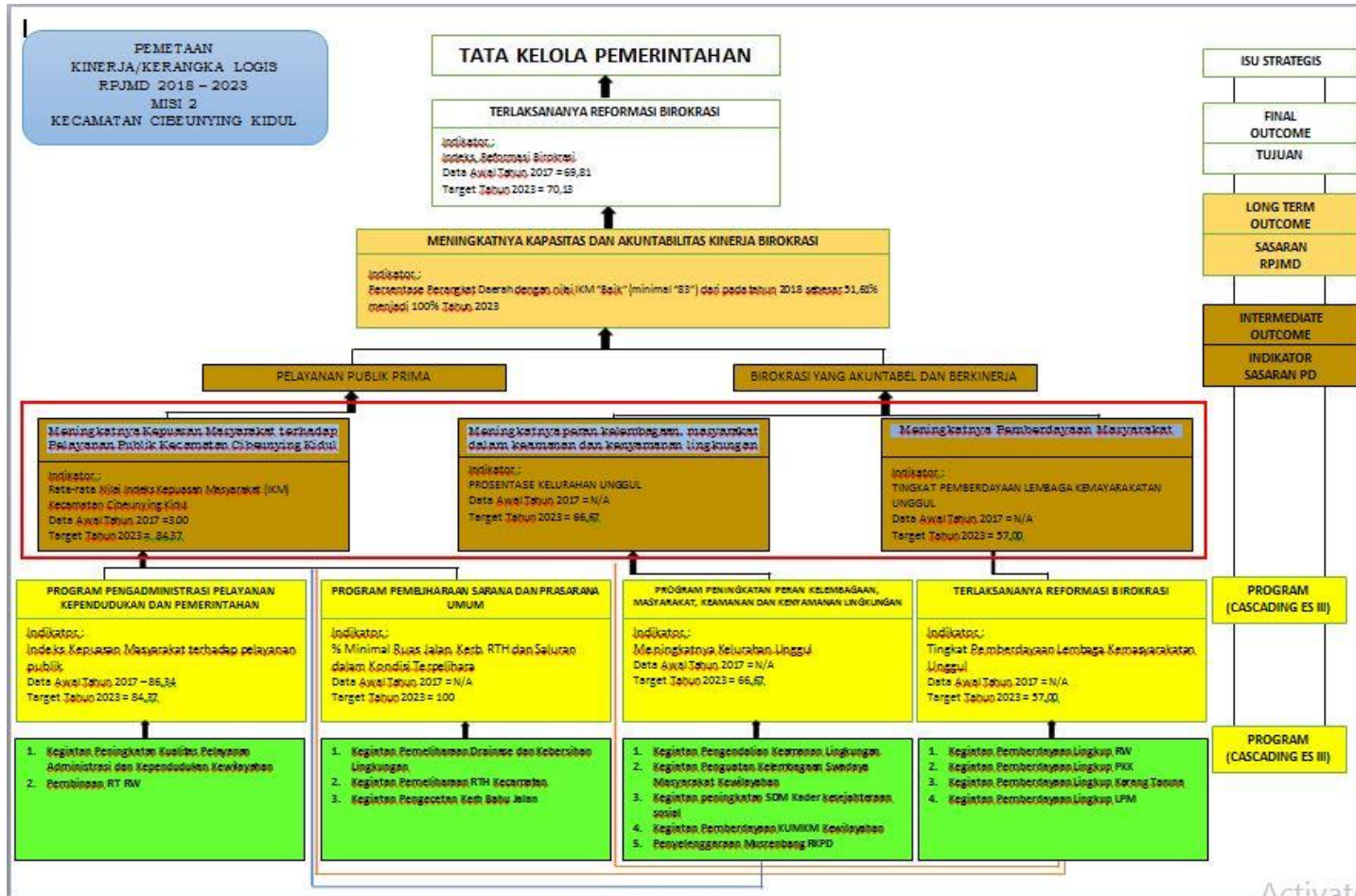
Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi			
Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeunying Kidul	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan public (action)
	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Mengoptimalkan pemenuhan janji walikota oleh aparaturnya kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program prioritas pemerintah kota Bandung
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk merealisasikan tujuan , sasaran yang telah ditetapkan maka disusun logic model yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 5.1.
Logic Model Kecamatan Cibeunying Kidul



6.1. Program dan Kegiatan Renstra 2013-2018

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dalam perencanaan strategis ,program yang dibuat harus mempunyai korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program.

Perencanaan program yang akan dilaksanakan di kecamatan di Kota Bandung harus berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: re-engineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Program kegiatan fasilitasi keuangan kecamatan meliputi revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionerisasi kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai basis bagi upaya mendorong ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
2. Pelayanan prima kepada segenap warga serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.
3. Peningkatan kinerja birokrasi kecamatan.
4. Penggabungan lintas sektoral dan vertical dalam upaya optimalisasi daya dukung, pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Program dan Kegiatan Lintas SKPD dan Kebijakan

Secara umum, untuk program dan kegiatan lintas SKPD dapat dikelompokkan kedalam :

1. Program dan kegiatan yang langsung ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
2. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kinerja aparat.
3. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Program dan Kegiatan

Berikut adalah program dan kegiatan pada kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi kecamatan Cibeunying Kidul. Perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan, mulai dari Rakorbang hingga penetapan skala prioritas, antara lain secara umum sebagai berikut :

Rincian program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2014 dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Cibeunying Kidul sebesar **Rp. 7.072.074.331,-** sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - k) Penyediaan makanan dan minuman.
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
 - c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
 - e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
 - a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
 - a) Pembinaan Kinerja Aparatur
 5. **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**
-

- a) Penyusunan system informasi terhadap layanan publik
- 6. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - b) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - c) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - d) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - e) Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - f) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tahun Anggaran 2015 dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Cibeunying Kidul sebesar **Rp. 17.632.116.515,-** sebagai berikut :

- 1. **Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - k) Penyediaan makanan dan minuman.
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
 - c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
- b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
- a) Pembinaan Kinerja Aparatur
5. **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**
- a) Penyusunan system informasi terhadap layanan public
6. **Program peningkatan pengembangan sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun .
7. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- d) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - e) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - f) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - g) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - h) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
 - i) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
8. **Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Fasilitasi lingkup RW

- b) Fasilitasi lingkup PKK
- c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
- d) Fasilitasi Lingkup LPM

Tahun Anggaran 2016 dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Cibeunying Kidul sebesar **Rp. 20.901.382.279,-** sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - k) Penyediaan makanan dan minuman.
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - b) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
 - c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
-

- a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
 - a) Pembinaan Kinerja Aparatur
- 5. **Program peningkatan pengembangan sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun .
- 6. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - b) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - c) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - d) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - e) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
 - f) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 7. **Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Fasilitasi lingkup RW
 - b) Fasilitasi lingkup PKK
 - c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
 - d) Fasilitasi Lingkup LPM

Tahun Anggaran 2017 dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Cibeunying Kidul sebesar **Rp. 23.611.483.651,-** sebagai berikut :

- 1. **Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - k) Penyediaan makanan dan minuman.
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
 - b) Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor
 - c) Pengadaan Pengadaan Mebelair
 - d) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
- a) Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
 - b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - b) Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - c) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.

- d) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
- e) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
- f) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

5. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :

- a) Fasilitasi lingkup RW
- b) Fasilitasi lingkup PKK
- c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
- d) Fasilitasi Lingkup LPM

Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran belanja langsung Kecamatan Cibeunying Kidul sebesar **Rp. 25.346.121.923,-** sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :**
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - e) Penyediaan alat tulis kantor
 - f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - i) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - k) Penyediaan makanan dan minuman.
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :**

- a) Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
 - b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. **Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya**
- a) Pengadaan pakaian KORPRI
 - b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. **Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.
 - b) Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.
 - c) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.
 - d) Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum.
 - e) Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - f) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan
5. **Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :**
- a) Fasilitasi lingkup RW
 - b) Fasilitasi lingkup PKK
 - c) Fasilitasi lingkup Karang Taruna
 - d) Fasilitasi Lingkup LPM

Jumlah Belanja Langsung Periode 2014 -2018 Kecamatan Kidul dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
 Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Cibeunying Kidul
 Tahun 2014- 2018

No	Kecamatan	Realisasi Anggaran (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Cibeunying Kidul	7.072.074. 331,00	17.632.116. 515,00	20.901.382.2 79,00	23.611.483.6 51,00	25.246.121.9 23,00

Sumber Data : SIMDA dari Tahun 2014 s.d 2018

6.2. Rencana Program dan Kegiatan Renstra 2018-2023

Adapun Kerangka Perencanaan Anggaran untuk Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel sebagai berikutsebagai berikut :

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Cibeunying Kidul
Tahun 2014- 2018

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	2,473,644,734	100%	2,721,009,207	100%	2,993,110,128	100%	3,292,421,141	100%	3,621,663,255	100%	15,101,848,466	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	12 Lap	307,450,135	12 Lap	338,195,149	12 Lap	372,014,663	12 Lap	409,216,130	12 Lap	450,137,743	12 Lap	1,877,013,819	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Keg	1 Keg	55,000,000	1 Keg	60,500,000	1 Keg	66,550,000	1 Keg	73,205,000	1 Keg	80,525,500	1 Keg	335,780,500	Kec Cibeunying Kidul	Kecamatan
		4.15.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	123 Unit	123 Unit	32,341,600	123 Unit	35,575,760	123 Unit	39,133,336	123 Unit	43,046,670	123 Unit	47,351,337	123 Unit	197,448,702	Kec Cibeunying Kidul	Kecamatan
		4.15.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	421,233,600	12 Jasa Bulanan	463,356,960	12 Jasa Bulanan	509,692,656	12 Jasa Bulanan	560,661,922	12 Jasa Bulanan	616,728,114	12 Jasa Bulanan	2,571,673,251	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	53 Unit	53 Unit	34,410,000	53 Unit	37,851,000	53 Unit	41,636,100	53 Unit	45,799,710	53 Unit	50,379,681	53 Unit	210,076,491	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	105,653,507	12 Lap	116,218,858	12 Lap	127,840,743	12 Lap	140,624,818	12 Lap	154,687,300	12 Lap	645,025,226	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 Lap	12 Lap	59,457,430	12 Lap	65,403,173	12 Lap	71,943,490	12 Lap	79,137,839	12 Lap	87,051,623	12 Lap	362,993,556	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	4 Laporan	4 Laporan	19,262,138	4 Laporan	21,188,352	4 Laporan	23,307,187	4 Laporan	25,637,906	4 Laporan	28,201,696	4 Laporan	117,597,279	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	7 Laporan	7 Laporan	663,918,755	7 Laporan	730,310,631	7 Laporan	803,341,694	7 Laporan	883,675,863	7 Laporan	972,043,449	7 Laporan	4,053,290,391	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	4 Laporan	4 Laporan	39,265,470	4 Laporan	43,192,017	4 Laporan	47,511,219	4 Laporan	52,262,341	4 Laporan	57,488,575	4 Laporan	239,719,621	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.	4 Laporan	4 Laporan	28,530,000	4 Laporan	31,383,000	4 Laporan	34,521,300	4 Laporan	37,973,430	4 Laporan	41,770,773	4 Laporan	174,178,503	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.017	Penyediaan makanan dan minuman.	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 Laporan	12 Laporan	65,879,050	12 Laporan	72,466,955	12 Laporan	79,713,651	12 Laporan	87,685,016	12 Laporan	96,453,517	12 Laporan	402,198,188	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 Laporan	7 Laporan	161,243,049	7 Laporan	177,367,354	7 Laporan	195,104,089	7 Laporan	214,614,498	7 Laporan	236,075,948	7 Laporan	984,404,938	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.01.019	Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi	Jumlah laporan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/te	12 Laporan	12 Laporan	480,000,000	12 Laporan	528,000,000	12 Laporan	580,800,000	12 Laporan	638,880,000	12 Laporan	702,768,000	12 Laporan	2,930,448,000	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			perkantoran/ teknis perkantoran	knis perkantoran															
		4.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	2,388,458,542	100%	2,627,304,396	100%	2,890,034,836	100%	3,179,038,319	100%	3,496,942,151	100%	16,939,912,921	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.05.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	2 unit	69,829,000	2 Unit	33,000,000	2 Unit	33,000,000	2 Unit	33,000,000	8 Unit	168,829,000	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.05.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebelair	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair	0	0	0	4 jenis	65,303,597	1 Jenis	88,000,000	1 Jenis	88,000,000	1 Jenis	88,000,000	5 Jenis	329,303,597	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.02.013	Dekorasi Pembangunan Gedung	Jumlah unit gedung yang didekorasi	1 Unit	1 Unit	230,750,000	1 Unit	300,000,000	3 Unit	250,000,000	0	0	0	0	4 Unit	780,750,000	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	Jumlah unit bangunan terpelihara	2 Unit	2 Unit	164,921,299	7 Unit	750,000,000	7 Unit	750,000,000	7 Unit	750,000,000	7 Unit	750,000,000	7 Unit	3,164,921,299	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	59 Unit	59 Unit	686,239,600	59 Unit	754,863,560	59 Unit	830,349,916	59 Unit	913,384,908	59 Unit	1,004,723,398	59 Unit	4,189,561,382	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.02.042	Pembangunan Gedung Kantor.	Jumlah gedung yang direhab	6 Unit	6 Unit	1,306,547,643	1 Unit	7,000,000,000	0	0	0	0	0	0	6 Unit	8,306,547,643	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	0	100%	143,710,676	100%	158,081,744	100%	173,889,918	100%	191,278,910	100%	666,961,247	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	52 stell	38,578,176	52 stell	42,435,994	52 stell	46,679,593	52 stell	51,347,552	52 stell	179,041,315	Kec Cibeunying Kidul	Kecamatan
		4.15.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	0	156 stell	105,132,500	156 stell	115,645,750	156 stell	127,210,325	156 stell	139,931,358	156 stell	487,919,933	Kec Cibeunying Kidul	Kecamatan
		4.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan ASN yang mendapat pembinaan	100%	100%	77,000,000	100%	84,700,000	100%	93,170,000	100%	102,487,000	100%	112,735,700	100%	470,092,700	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.05.02	Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Paket	1 Paket	77,000,000.00	1 Paket	84,700,000	1 Paket	93,170,000	1 Paket	102,487,000	1 Paket	112,735,700	1 Paket	470,092,700	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibeunying Kidul	70	70	13,749,341,980	71	15,124,276,178	72	16,636,703,796	73	18,300,374,175.38	74	20,130,411,592.92	74	65,849,621,855.10		
Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan				Persentase Kelurahan Unggul	N/A	N/A	7,855,737,480	16,67%	8,641,311,228	33,33%	9,505,442,351	50%	10,455,986,586	66,67%	11,501,585,244	66,67%	38,914,319,956		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.15	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	75%	75%	1,962,132,980	75%	2,158,346,278	75%	2,374,180,906	75%	2,611,598,996	75%	2,872,758,896	75%	11,979,018,056	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	64 RW	64 RW	1,962,132,980	65 RW	2,158,346,278	65 RW	2,374,180,906	65 RW	2,611,598,996	65 RW	2,872,758,896	65 RW	11,979,018,056	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.25.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	-	435 kader	629,351,042	435 kader	692,286,146	435 kader	761,514,761	435 kader	837,666,237	435 kader	921,432,861	435 kader	3,842,251,047	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.33.001	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	-	107 kader/ke l	320,510,000	107 kader/ke l	352,561,000	107 kader/ke l	387,817,100	107 kader/ke l	426,598,810	107 kader/ke l	469,258,691	107 kader/ke l	469,258,691	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.25.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/ke lurahan	-	86 Usaha / Klp / Org	95,456,200	86 Usaha / Klp / Org	105,001,820	86 Usaha / Klp / Org	115,502,002	90 Usaha / Klp / Org	127,052,202	95 Usaha / Klp / Org	139,757,422	95 Usaha / Klp / Org	582,769,647	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	-	180 orang	46,493,067.00	190 orang	51,142,374	195 orang	56,256,611	200 orang	61,882,272	210 orang	68,070,499	215 orang	283,844,823	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibeuying Kidul			Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se Kecamatan Cibeuying Kidul	75	75	5,893,604,500	75,4	6,482,964,950	75,6	7,131,261,445	75,8	7,844,387,590	76	8,628,826,348	76	26,935,301,899	Kec Cibeuying Kidul	Kec + Kel
	4.15.20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	75%	2,696,485,000	75,2%	2,966,133,500	75,5%	3,262,746,850	75,8%	3,589,021,535	76,2%	3,947,923,689	76%	7,416,567,640	Kec Cibeuying Kidul	Kec + Kel
	4.15.20.01		Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	-	28 Laporan	67,785,000	28 Laporan	74,563,500	28 Laporan	82,019,850	28 Laporan	90,221,835	28 Laporan	99,244,019	28 Laporan	413,834,204	Kec Cibeuying Kidul	Kec + Kel
	4.15.20.02		Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	-	100 %	2,628,700,000	100 %	942,476,500	100 %	1,036,724,150	100 %	1,140,396,565	100 %	1,254,436,222	100 %	7,002,733,437	Kec Cibeuying Kidul	Kec + Kel
	4.15.42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	-		3,197,119,500		3,516,831,450		3,868,514,595		4,255,366,055		4,680,902,660		19,518,734,259	Kec Cibeuying Kidul	Kec + Kel
	4.15.42.015		Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	-	370 m ²	157,516,931	370 m ²	173,268,624	370 m ²	190,595,487	370 m ²	209,655,035	370 m ²	230,620,539	370 m ²	961,656,615	Kec Cibeuying Kidul	Kec + Kel
	4.15.42.014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan	Panjang Drainase terpelihara	-	4500 m ²	2,891,818,073	4500 m ²	3,180,999,880	4500 m ²	3,499,099,868	4500 m ²	3,849,009,855	4500 m ²	4,233,910,841	4500 m ²	17,654,838,517	Kec Cibeuying Kidul	Kec + Kel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Lingkungan																	
		4.15.42.016	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	-	3.722 m2	147,784,496	3.722 m2	162,562,946	3.722 m2	178,819,240	3.722 m2	196,701,164	3.722 m2	216,371,281	3.722 m2	902,239,127	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel	
Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat				Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan wilayah	75%	75%	10,957,459,207	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Cibeunying Kidul		
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan kewilayahan	75%	75%	10,957,459,207	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Cibeunying Kidul		
		4.15.26	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75%	75%	10,815,509,940	75,4%	11,370,000,000	75,6%	12,420,000,000	75,8%	13,488,000,000	76%	13,110,000,000	76%	61,203,509,940	Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel	
		4.15.26.01	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	418 sub keg	418 sub keg	9,024,808,475	424 sub keg	9,570,000,000	418 sub keg	10,440,000,000	418 sub keg	11,310,000,000	418 sub keg	11,310,000,000	418 sub keg	51,654,808,475	Kec Cibeunying Kidul	Kelurahan	
		4.15.26.02	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	61 sub Keg	61 sub Keg	599,505,557	61 sub Keg	600,000,000	58 sub Keg	660,000,000	58 sub Keg	726,000,000	58 sub Keg	600,000,000	58 sub Keg	3,185,505,557	Kec Cibeunying Kidul	Kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.15.26.03	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPembudayaan Lingkup Karang Taruna	38 sub keg	38 sub keg	590,870,907	38 sub keg	600,000,000	36 sub keg	660,000,000	36 sub keg	726,000,000	36 sub keg	600,000,000	36 sub keg	3,176,870,907	Kec Cibeunying Kidul	Kelurahan
		4.15.26.04	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPembudayaan Lingkup LPM	42 sub keg	42 sub keg	600,325,001	40 sub keg	600,000,000	30 sub keg	660,000,000	30 sub keg	726,000,000	30 sub keg	600,000,000	30 sub keg	3,186,325,001	Kec Cibeunying Kidul	Kelurahan
		4.15.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	-	100%	46,493,067											Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	-	180 orang	46,493,067.00												
		4.15.25	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	-	86,15 %	95,456,200											Kec Cibeunying Kidul	Kec + Kel
		4.15.25.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM Aktif diwilayah kecamatan/kecamatan/kecamatan	-	86 Usaha / Klp / Org	95,456,200												

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung berdasarkan 3 (Tiga) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut :

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019- 2023

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)
Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
<i>Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	<i>Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	<i>Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan</i>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)
<i>Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Kantor yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi</i>
<i>Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	<i>Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran</i>	<i>Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran</i>
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik
<i>Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>
<i>Kegiatan Pengadaan Mebeulair</i>	<i>- Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair</i>
<i>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah unit bangunan terpelihara</i>
<i>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara</i>
<i>Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</i>	<i>- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi</i>
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
<i>Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.</i>	<i>- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>
<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	<i>- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</i>

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
<i>Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur</i>	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan
<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif
<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	Jumlah kelompok/kader RW siaga
<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	pembentukan koperasi di tempat ibadah
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan</i>	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public
<i>Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan</i>	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap
<i>Kegiatan Pembinaan RT RW</i>	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih
<i>Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan</i>	luas RTH kecamatan terpelihara
<i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i>	Panjang Drainase terpelihara
<i>Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan</i>	Panjang kerb terpelihara
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)
	Kemasyarakatan
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup RW</i>
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup PKK</i>
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna</i>
<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM</i>	<i>Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM</i>

Program Prioritas Tahun 2019- 2023

Adapun yang menjadi Program Prioritas Tahun 2019-2023 adalah Program yang menunjang Tupoksi Kecamatan yaitu program/ kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Pelayanan Masyarakat yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
4. Program yang berkenaan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yaitu Program Pemberdayaan Kewilayahan.



RENSTRA 2018-2023

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. IKU, sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Cibeunying Kidul dengan Pemerintah Kota Bandung, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung diselaraskan dengan seluruh indikator Pemerintah Kota Bandung yang menjadi indikator dari visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Agamis”**.

Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cibeunying Kidul dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir tahun periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	N/A	70	84,34	84,35	84,36	84,37	84,37
2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Kelurahan Unggul	N/A	16,67%	33,33%	50%	66,67%	66,67%	66,67
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	N/A	15,71	16,71	17,71	18,71	19,71	19,71

Sumber: *Proyeksi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung*



PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung lima tahun kedepan.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cibeunying Kidul sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung, maka rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RENSTRA Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Cibeunying Kidul harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018-2023.

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2018-2023.
4. RENSTRA Kecamatan Cibeunying Kidul akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.
5. Dalam rangka efektivitas, perubahan RENSTRA Kecamatan Cibeunying Kidul tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul.

Bandung, 02 September 2019

Camat Cibeunying Kidul,



Drs.H.ARIS RUSDIANTO,M.SI

NIP 19690410 198903 1 005

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kelurahan ,RW dan RT di Kecamatan Cibeunying Kidul	17
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk berdasarkan Usia di Kecamatan Cibeunying Kidul	18
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan di Kecamatan Cibeunying Kidul	19
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Tenaga Kerja di Kecamatan Cibeunying Kidul	19
Tabel 2.5	Komposisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan Kecamatan Cibeunying Kidul	20
Tabel 2.6	Komposisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Cibeunying Kidul	21
Tabel 2.7	Bidang Kesehatan pada Kecamatan Cibeunying Kidul	22
Tabel 2.8	Bidang Olahraga pada Kecamatan Cibeunying Kidul	22
Tabel 2.9	Bidang Ekonomi pada Kecamatan Cibeunying Kidul	23
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung	25
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2013-2018	29
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2013-2018	30
Tabel 3.1.	Hasil Telaah RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2013-2018	67
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	83
Tabel 5.1.	Tujuan,Sasaran,Strategis dan Kebijakan	88
Tabel 6.1.	Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Cibeunying	108

Kidul Tahun 2014-2018

Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2014-2018	109
Tabel 6.3.	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2023	117
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019-2023	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	16
Gambar 2.2.	Peta Wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul	17
Gambar 3.1	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung	63
Gambar 3.2.	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung	65
Gambar 4.1.	Alur Kaitan Visi dan Misi Kota Bandung dengan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kidul	82
Gambar 5.1.	Cascading Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Sasaran -1	89
Gambar 5.2.	Cascading Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Sasaran -2	92
Gambar 5.3	Cascading Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Sasaran -3	95